

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Handri Rahardjo, 2009 *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni
- J. Satrio, 1997 *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Kette Soleman, *Bahan Ajar Hukum Acara Perdata*
- Kette Soleman, *Bahan Ajar Hukum Perdata*
- Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Perikatan*, Jakarta: sinar grafik
- Laila M. Rasyid, SH, M. Hum Herinawati, SH, M. Hum *Pengantar Hukum Acara Perdata*
- Maria SW Soemardjono, 1996, *Hak Tanggungan dan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa
- Subekti 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M, Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- R, Wirjonoprojodikoro, 1903, *Perbuatan Melawan hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar maju
- Tio Serepina Sianaan, 2019, *Penanganan Perkara Perdata pada Tingkat Pertama*,
- Yahman, 2016, *karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*, rawamangun, jakarta: prenadamedia group
- Yulia ,SH., M.H, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi, Unimal Press,

Sumber Jurnal

- Dara Sari Sinaga, Akmaluddin Syahputra, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Volume 39, No. 1, Maret
- Gusti Bagus Hengki, Ni Galuh Ayu Gresia Pratiwi, “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Wanprestasi Dikabupaten Gianyar”, *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 0 , No. 01, 2022
- Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”, *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2, November 2023
- Lia Oktavia, “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, December 2024
- Ni Made Ayu Pratiwi, Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No.2, Mei 2021
- Nur Azza Morlin Iwanti, Taun(Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku) *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. VI, No. 2, Desember 2022
- Rudyanti Dorotea Tobing, Calvariana Aruds Dukuy dan Ahyoanto Zadrakh Dukui. *Hukum Perjanjian. LaksBang Justitia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mei 2024,
- Said Hendri Darmawan, "Analisis Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2025
- Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar dkk, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang, *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1, 2022 Januari
- Syaeful Bahri, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Akta*, Vol.V, No. 7, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2017
- Tresna I.W. Nusa, Meiske Sondakh, Josina Emelia Londa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI, No.4, Mei 2023
- Putri Anggun Puspasari, Ni Luh Made Mahendrawati, dkk, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Gianyar", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 – Februari 2021
- Rahmat Bakhtiar Pratama, Hendra Djaja, dkk, ”Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online”, *Bhirawa Law Journal* Volume 1, Issue 1, May 2020

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bantul. (2010). Putusan Nomor 34G2010PN.BTL

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta. (2011). Putusan Nomor 68B2011PTY.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 2417K2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 341PK2019